BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kinerja pemerintahan, laporan keuangan adalah hal yang sangat penting untuk memperoleh suatu informasi mengenai posisi keuangan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai oleh pemerintah pusat/daerah selama satu tahun anggaran yang bersangkutan. Selain pemerintah pusat yang membuat laporan keuangan, pemerintah daerah, kota, atau provinsi beserta seluruh badan dinas dan instansi harus mampu dan wajib membuat laporan keuangan.

Adanya otonomi daerah membuat secara tidak langsung pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan tepat. Pemerintah daerah diwajibkan bertanggungjawab dan terbuka kepada masyarakat dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangann serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan yang semakin besar terhadap

pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode pelaporan. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola laporan keuangan. Peraturan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah mengeluarkan peraturan ini karena untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan. PSAP Nomor 01 Tahun 2010 membahas tentang tujuan laporan keuangan, tanggung jawab laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, identifikasi laporan keuangan, dan periode pelaporan.

Di Indonesia sendiri telah diterapkan standar akuntansi pemerintah yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan yaitu PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan, akan tetapi dalam hal

penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah masih belum memenuhi standar akuntansi pemerintah Nomor 01 dikarenakan masih deitemukannya masalah-masalah yang ada dalam penyajian laporan keuangan.

Permasalahan didalam penyajian laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik atau masyarakat masih menyisahkan permasalahan dan keraguan akan kebenarannya. Seperti yang dikutip dari laman BPK, Laporan Hasil Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa dalam laporan keuangan masih ditemukan msalah seperti, piutang yang tidak tertagih per 31 Desember 2016 tercatat mencapai Rp. 185,75 triliun. Piutang yang tidak tertagih tersebut seharusnya di masukan ke dalam cadangan (ujar ketua BPK).

Akan tetapi pemerintah pusat tidak mencadangkan piutang tersebut. Oleh karena itu ketua BPK bapak Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat tersebut belum disajikan secara wajar dan belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kemudian BPK juga menemukan ada 1.137 ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara, Dari jumlah tersebut ada 770 masalah yang berdampak terhadap finansial negara hingga mencapai angka Rp 3,41 triliun. Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan

standar akuntansi pemerintah terlebih lagi dalam hal penyajian laporan keuangan.

Dalam pemerintah provinsi Gorontalo juga masih memiliki masalah dalam laporan keuangannya. Seperti yang dikatakan oleh bapak sjafrudin Mosi'I, S.E.,M.M., menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti bersih dari masalah. Jika BPK memberikan opini WTP, bukan berarti menjamin institusi yang menjadi audit (pihak yang diperiksa BPK) tidak terjadi masalah dalam mengelola keuangan negara. Sebagian besar masalah yang terjadi pada pemerintah daerah di Gorontalo, yang selalu menjadi batu sandungan adalah aset daerah. Seperti yang terjadi di pemerintahan kabupaten Bone Bolango saat pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pemerintah kabupaten Bone Bolango sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Namun BPK masih menemukan ketidakjelasan manajemen aset yang membuat keyakinan pemeriksa tidak dapat meyakini nilai yang disajikan oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan ketidakwajaran dalam laporan keuangan. Berikut ini beberapa temuan yang terkait, antara lain: Pengelolaan dan pertanggungjawaban kas dibendahara pengeluaran belum memadai; Aset tanah belum disertai bukti kepemilikan dan belum disajikan secara andal; Pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin pemerintah kabupaten Bone Bolango belum tertib. Permasalahan lain

yaitu perlu ditingkatkan hubungan kelembagaan antara BPK dengan pemerintah kabupaten Bone Bolango melalui tindakan nyata untuk mewujudkan tata kelola keungan daerah yang akuntabel dan transparan (www.gorontalo.bpk.go.id).

Dari permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bone bolango masih belum memenuhi kriteria andal. Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi empat karakteristik laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dalam menyusun laporan keuangan inilah dibutuhkan yang namanya transparansi dan akuntabilitas. Oleh sebab itu laporan keuangan memegang peranan penting dalam hal pengambilan keputusan. Sebagaimana kita ketahui laporan keuangan daerah berfungsi untuk menghasilkan penilaian kinerja pemerintah itu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemerintah daerah (*stakeholders* pemerintah daerah). Selama ini pelaporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Kurangnya informasi yang disajikan mengakibatkan pemerintah tidak mempunyai manajerial yang baik dan tidak bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

Melihat permasalahan tersebut, hal ini menguatkan berbagai penelitian dan teori yang mengatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula atau laporan keuangan yang berkualitas. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh BPK dengan tujuan untuk memberikan opini kewajaran laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan tersebut berkualitas pemerintah harus mempertimbangkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan, (Soetjipto dan Sudikdiono, 2011).

Berbagai penelitian terdahulu yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, diantaranya penelitian dari Widyawati (2015) yang dilakukan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hasil penelitiannya membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, selain itu penelitian dari Pratiwi (2014) membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada biro keuangan sekretariat daerah pemerintah provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini adalah replika dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widyawati (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada: (1) objek penelitian yaitu pada penelitian sebelumnya meneliti di seluruh SKPD kabupaten sidoarjo sedangkan pada penelitian ini hanya pada 1 SKPD saja yang ada di Kabupaten Bone Bolango, (2) penelitian ini tidak memakai uji efektivitas tapi penelitian sebelumnya memakai uji efektivitas. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian dari pratiwi (2014) yaitu terletak pada objek penelitian juga yaitu penelitian sebelumnya meneliti pada Biro Keuangan Sekretariat Provinsi akan tetapi pada penelitian ini hanya meneliti pada Kabupaten Bone Bolango di badan keuangan dan pendapatan daerah.

Adanya fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan tersebut. Maka penulis ingin meneliti dengan merumuskan judul penelitian **"Pengaruh Penerapan PSAP Nomor 01 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah yaitu belum maksimalnya penyajian laporan keuangan karena masih ada beberapa yang belum disajikan sesuai dengan PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah penerapan PSAP Nomor 01 berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan PSAP Nomor 01 terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

1.5.1 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan penerapan PSAP Nomor 01 terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil penelitian ini sebagai referensi untuk diprbandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam penyajian penyusunan laporan keuangan.